

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu (Harahap 2015:105). Laporan keuangan dianggap sebagai suatu informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi perusahaan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan. Melihat pentingnya laporan keuangan dalam menilai kesehatan perusahaan tersebut, maka laporan keuangan harus disusun secara jelas dan berdasarkan standar yang berlaku. Standar akuntansi keuangan di Indonesia terdiri atas 4 pilar yaitu SAK yang berlaku umum, SAK ETAP, SAK Syariah, dan SAP (Masruri, Muhammad, dkk, 2018).

Martini (2011) menyatakan bahwa penerapan SAK ETAP lebih sederhana dibanding penerapan PSAK umum yang mengacu pada IFRS dikarenakan SAK ETAP mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan. Dijelaskan oleh Basir (2010) bahwa penerapan SAK ETAP bebas diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP), jika ETAP belum memiliki rencana pengembangan ke depan, bisnisnya dijalankan secara sederhana, tidak terlalu membutuhkan pendanaan dari lembaga keuangannya, maka entitas ini tidak perlu menerapkan PSAK umum. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP (Syarif, 2010).

SAK umum cukup sulit penerapannya bagi pelapor keuangan usaha kecil. Pelaku usaha kecil umumnya hanya memiliki pengetahuan akuntansi yang minim dan masih menerapkan akuntansi sederhana pada pencatatan dan penyajian laporan keuangan usaha sehingga usaha kecil sering menggunakan SAK ETAP (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 3 paragraf 12 tahun 2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah Standar akuntansi keuangan untuk entitas yang tidak perlu menyampaikan laporan keuangannya kepada publik secara langsung. Menurut Martani (2011) dalam Efendi (2015:7) syarat menggunakan SAK ETAP menurut Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit.

Penelitian ini dilakukan di Biro Jasa Gajah Mada merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengurusan surat-surat kendaraan bermotor. Biro Jasa Gajah Mada memiliki jangkauan penjualan jasa yang lebih luas dari pada perusahaan sejenisnya dan termasuk dalam daftar perusahaan besar diwilayah kota ponorogo. Biro Jasa gajah Mada merupakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik namun ketika melakukan pengembangan usaha dengan menggunakan pinjaman bank, tetap harus mempunyai laporan keuangan sebagai persyaratan. Menurut Tambunan (2012), menyatakan bahwa pengembangan usaha tentu saja membutuhkan pendanaan yang cukup besar dan pemisahan dana pribadi

dengan dana perusahaan sehingga, peran bank dan lembaga keuangan lainnya sangat penting untuk membantu para pelaku usaha seperti biro jasa. Alasan biro jasa menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik SAK- ETAP adalah untuk memenuhi syarat dalam rangka mencari tambahan modal dari pemerintah maupun perbankan. SAK ETAP lebih mudah dipahami sehingga seringkali digunakan oleh lembaga UMKM. Rudiantoro, dan Siregar (2011) menyatakan bahwa diharapkan UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi investor maupun kreditor dalam memberikan bantuan pembiayaan bagi para pengusaha UMKM.

■ Biro jasa merupakan bagian dari UMKM yang memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan kredit untuk tambahan modal. Hingga saat ini banyak program pembiayaan bagi UMKM baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun oleh perbankan. Salah satu program pemerintah Indonesia terkait pembiayaan UMKM adalah kredit usaha rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (PERMENKOM) No 8 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu kredit pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur usaha dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Menurut Retnadi (2008), memaknai KUR sebagai kredit modal kerja atau kredit investasi dengan plafon kredit sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang memiliki usaha yang produktif yang akan mendapat penjaminan dari

perusahaan penjamin. KUR dapat memberikan bantuan kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Adanya program KUR tersebut menuntut UMKM untuk mampu memenuhi persyaratan perolehannya yang salah satunya adalah mampu menyusun laporan keuangan berstandar ETAP. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi UMKM dalam menyusun laporan keuangan berstandar ETAP.

Suhairi (2004), berpendapat bahwa kelemahan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan kurangnya pelatihan penyusunan laporan keuangan. Satyo (2005), berpendapat bahwa rendahnya penyusunan laporan keuangan disebabkan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. Kendala yang dialami oleh Biro Jasa Gajah Mada dalam penerapan SAK-ETAP pada laporan keuangan yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman karyawan tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Sehingga mekanisme penerapan SAK ETAP masih terdapat beberapa kemungkinan adanya perbedaan dalam pengakuan dan pencatatan transaksi. Hal tersebut membutuhkan evaluasi supaya dapat digunakan untuk memperbaiki kelemahan dalam proses pelaporan keuangan. Penelitian penggunaan SAK ETAP pada biro jasa sangat penting dilakukan karena dapat membantu melakukan evaluasi terhadap penerapan SAK ETAP yang sesuai. Hal tersebut dapat digunakan untuk membantu Biro Jasa mengembangkan usaha dalam pengusulan pinjaman modal kepada bank.

Penelitian mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik telah dilakukan antara lain oleh Floren dan Fefri (2013) dalam penelitiannya yaitu penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) studi kasus pada CV Citra Pandion Bernas di Kabupaten Solok. Hasilnya penerapan laporan keuangan CV Citra Pandion Bernas ditinjau berdasarkan SAK ETAP belum sepenuhnya dilakukan. Penelitian yang lain dilakukan oleh Muhammad dan Masruhi dkk (2018) dalam penelitiannya yaitu implementasi SAK-ETAP pada umkm warkop di kota Makassar. Hasilnya pengelola UMKM warkop tidak menerapkan SAK-ETAP dalam menyusun laporan keuangan karena kurangnya pemahaman tentang SAK-ETAP. Penelitian lainnya dilakukan oleh Hetika dan Nurul (2017) tentang Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada UMKM Kota Tegal hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan oleh UMKM di Kota Tegal masih sangat sederhana yaitu hanya melakukan pencatatan mengenai keluar masuk kas dan penyusunan laporan laba rugi sederhana. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ade dan Jullie dkk (2014) tentang penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan PT Nichindo Manado Suisan. Hasilnya bahwa PT Nichindo Manado Suisan belum menyusun laporan keuangan lengkap menurut SAK ETAP. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Friska dan I Gede (2018) dalam penelitiannya yaitu penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada PT Aira Nusantara Indah. Hasilnya PT Aira Indah tidak membuat laporan keuangan, sehingga penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK ETAP.

Penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Hal tersebut terlihat pada proses penerapan pelaporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Penelitian terdahulu mengevaluasi proses pelaporan keuangan pada laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian ini melakukan evaluasi penerapan standar SAK ETAP mulai dari pengakuan transaksi sampai pada pelaporan keuangan sesuai standar ETAP. Hal tersebut dimaksudkan untuk membantu melakukan evaluasi pada Biro Jasa Gajah Mada dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.

Berdasarkan latar belakang diatas judul penelitian yang diambil yaitu **“Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP ) Pada Biro Jasa Gajah Mada Ponorogo”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penerapan pencatatan akuntansi pada Biro Jasa Gajah Mada Ponorogo?
2. Bagaimanakah tingkat kesesuaian penerapan pencatatan akuntansi berdasarkan SAK ETAP?

## **1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti didasarkan atas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi penerapan pencatatan akuntansi pada Biro Jasa Gajah Mada.
2. Menganalisis tingkat kesesuaian penerapan pencatatan akuntansi berdasarkan SAK ETAP.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan referensi baru untuk universitas khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Biro Jasa Gajah Mada Ponorogo

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai bahan masukan atau sumbangan informasi terhadap biro jasa serta memberikan kontribusi terhadap Biro Jasa Gajah Mada dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP yang diharapkan dapat berdampak pada pengembangan usaha.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini bagi penulis juga diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta menambah pemahaman tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada Biro Jasa.

#### 4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan penelitian selanjutnya, agar dapat menjadi suatu penyempurnaan penelitian. Dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada Biro Jasa.

